



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 239 TAHUN 2023 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023-2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi telah diatur indikator capaian implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi General dan indikator dampak Reformasi Birokrasi Tematik, maka indikator capaian dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 239 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 239 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026, perlu adanya perbaikan target dan penyesuaian manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 239 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;


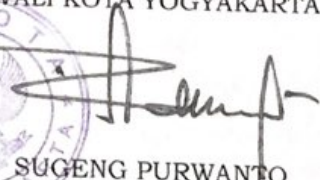
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
5. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 239 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2023 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023–2026.
- KESATU : Ketentuan Lampiran *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2026 pada:
1. BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA; dan
 2. BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI,
- diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,



SUGENG PURWANTO

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta; dan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 239
TAHUN 2023 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-
2026

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis RB

Fokus Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi. Dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pedoman *road map* tersebut sekaligus menyusun pedoman *road map* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk Periode 2023-2026, maka dilakukan penetapan tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut.

3.1.1. Tujuan Pelaksanaan RB

Tujuan yang terdapat pada *road map* sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari *road map* setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik".

Tabel 3.1.1. Indikator dan Target Tujuan

Tujuan RB 2023 - 2026	Indikator Tujuan	Base- line	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan	Capaian Indeks RB Pemerintah Kota Yogyakarta	76,22	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
	Capaian Indikator	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

publik	Kinerja Pembangun-an:					
	Angka Kemiskinan	6,62	Menu-run	Menu-run	Menu-run	Menu-run
	Pertumbuh-an Investasi (Realisasi Penanaman Modal)	Rp. 308.015.205.801	Mening-kat	Mening-kat	Mening-kat	Mening-kat

3.1.2. Sasaran Strategis Pelaksanaan RB

Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.
- b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Tabel 3.1.2. Indikator dan Target Sasaran Strategis

Sasaran Strategis RB	Indikator Sasaran Strategis	Baseline	Target			
		2022	2023	2024	2025	2026
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks SPBE	2,85	Baik	Baik	Baik	Baik
	Capaian AKIP	A	A	A	A	A
	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	-	Baik	Baik	Baik	Baik
	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	62,8%	B	B	A	A
	Nilai Survei Penilaian Integritas Eksternal	86,40	Baik	Baik	Baik	Baik
	Nilai Survei Penilaian Integritas Internal	83,61	Baik	Baik	Baik	Baik
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,24	Baik	Baik	Baik	Baik

3.1.3. Isu Strategis RB

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta ditujukan untuk menyelesaikan beberapa isu strategis di Pemerintah Kota Yogyakarta dan berkontribusi terhadap penyelesaian isu strategis nasional. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

a. Isu Tingkat Hulu

1) Transformasi Digital dan Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Transformasi Digital dan percepatan SPBE merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Sasaran dari kebijakan ini adalah "Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional" yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun *Jogja Smart Services* (JSS) sejak ditetapkannya Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 373 Tahun 2018 tentang Penerapan *Jogja Smart Services*. Selanjutnya JSS ditetapkan sebagai aplikasi super (*SuperApp*) yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 208 Tahun 2023 tentang Penerapan *Jogja Smart Services* sebagai *SuperApp* Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik. Meskipun telah menjalankan upaya pelayanan publik berbasis elektronik, Pemerintah Kota Yogyakarta masih perlu memadukan atau menyinkronkan dan terus melakukan perbaikan selaras dengan kebijakan SPBE secara mandatory tersebut.

Gambar 3.1. Aplikasi JSS



2) Transformasi Birokrasi *Agile* dengan Mekanisme Kerja Baru

Sasaran dari kebijakan birokrasi *agile* dengan mekanisme kerja baru adalah "Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi". Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Tahun 2021. Selanjutnya Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membangun sistem kerja yang *agile* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sesuai mandatory tersebut.

3) Optimalisasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK

Sasaran Budaya Birokrasi BerAKHLAK ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta ditujukan untuk menguatkan Budaya Birokrasi BerAKHLAK di Pemerintah Kota Yogyakarta.

4) Optimalisasi Profesionalitas ASN

Hasil penilaian indeks ASN Profesional sebesar 51,09 dari skala 100 di tahun 2022. Hasil tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memperoleh hasil penilaian sebesar 72,36 pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh permasalahan pengembangan kompetensi ASN khususnya pada jabatan fungsional yang disetarakan pada mekanisme penyederhaan birokrasi dan beberapa permasalahan sumber daya manusia yang lainnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mewujudkan ASN professional di di Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Isu Tingkat Hilir

1) Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan di Pemerintah Kota Yogyakarta masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data kemiskinan dan pengukuran dampak atau hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan SIM terpadu pengentasan kemiskinan untuk menjadi *database* pemberian intervensi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan untuk mengukur dampak intervensi yang telah diberikan. SIM tersebut juga perlu diintegrasikan dengan SIM DTKS Pemerintah Pusat. Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Pemerintah Kota Yogyakarta difokuskan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan yang efektif, efisien dan tepat sasaran di Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain permasalahan SIM Terpadu, reformasi birokrasi tematik juga ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan stunting di Kota Yogyakarta yang menjadi salah isu strategis nasional.

2) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta juga diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

3) Isu yang berkaitan dengan arahan prioritas Presiden meliputi Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri, Peningkatan Investasi, penanganan inflasi, dan penanganan stunting.

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General
3.2.1. Perbaikan Target Kegiatan Utama

Tabel. 3.2.1. Perbaikan Target Kegiatan Utama

Sasaran Strategis	Sasaran (Indikator Outcome)	Kegiatan Utama (Mandat)	Indikator Kegiatan Utama	Indikator dan Target (lama)				Perbaikan Indikator & Target (Baru)				Perbaikan Deskripsi Unit Kerja					
				Force/line Tahun 2024	Target Per Tahun			Indikator Kegiatan Utama	Baseline Tahun 2024	Target Per Tahun			Relevansi/Leads/Inisiatif	Praktik/Praktik Baik			
					2023	2024	2025			2026	2023	2024			2025	2026	
S-1 Strategis Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	S-1 Tingkat keberhasilan Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	Peningkatan Sistem Birokrasi Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	Tingkat Implementasi Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	91%	100	100	100	100	100	100	100%	Baik	Baik	Baik	Baik	Bagian Organisasi Struktur Organisasi BNSM	Bagian Organisasi Struktur Organisasi BNSM
				-	-	-	-	-	-	-	-	91%	Baik	Baik	Baik	Baik	Bagian Organisasi Struktur Organisasi
S-2 Strategis Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	S-2 Tingkat keberhasilan Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	Peningkatan Sistem Birokrasi Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	Tingkat Implementasi Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	-	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Bagian Organisasi Struktur Organisasi	Bagian Organisasi Struktur Organisasi
				-	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	1. Monev 2. Tindak Korektif 3. Monev	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik
S-3 Strategis Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	S-3 Tingkat keberhasilan Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	Peningkatan Sistem Birokrasi Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	Tingkat Implementasi Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	2,08	3,2	3,4	3,6	3,8	3,8	3,8	2,08	Baik	Baik	Baik	Baik	Deskriptor Unit Kerja	Deskriptor Unit Kerja
				-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik
S-4 Strategis Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	S-4 Tingkat keberhasilan Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	Peningkatan Sistem Birokrasi Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	Tingkat Implementasi Perencanaan Struktur Organisasi/transfer fungsi kegiatan dan sumber daya	93,7	94	95	96	97	97	93,7	93,7	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Bappoda	Bappoda
				A	A	A	AA	AA	AA	AA	AA	83,67	A	A	A	A	A

Indeks Sistem Merit	309,5	310	315	325	350	KU. 19 Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	300,5 (Bak)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	BKPRDM	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
Peningkatan Core Value ASN	Indeks Sistem Merit	62,8%	70%	80%	90%	KU.20 Peningkatan Core Value ASN	Indeks BersAKHLAK	62,8% (Cukup Sehat)	B (Cukup Sehat)	A (Sehat)	A (Sehat)	A (Sehat)	A (Sehat)	BKPRDM	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
	Nilai Survei Indeks BersAKHLAK	-	-	-	-	-	Nilai Employee Branding ASN	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BKPRDM	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,55	4,6	4,7	4,8	4,9	Indeks Pelayanan Publik	4,55 (Pelayanan Prima)	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
	Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan Publik	90,75	91	92	93	94	Tingkat Kepuasan Standar Pelayanan Publik	90,75 (22,5% dari Skala 100) (Tertinggi)	Zona Hijau (Kategori Tertinggi)	Zona Hijau (Kategori Tertinggi)	Zona Hijau (Kategori Tertinggi)	Zona Hijau (Kategori Tertinggi)	Zona Hijau (Kategori Tertinggi)	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
	Survey Kepuasan Masyarakat (Tingkat Kota Yogyakarta)	84,24	84,34	84,44	84,54	84,64	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,24 (Bak)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja

Dalam hal terdapat perubahan indikator berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, maka penetapan target disesuaikan dan dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General.

3.2.2. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Tabel. 3.2.2. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Sasaran Strategis	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama (Mandatory)	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksisting	Target 2026	Aspek Identifikasi (Skala 1 - 10, 1 = Sangat Tidak Sesuai, 10 = Sangat Sesuai)			Skala Prioritas	Ket.
						Mandat RB Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu Mendesak		
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincab, Kolaboratif, dan Akuntabel	S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyelenggaraan Birokrasi	Penyelenggaraan Birokrasi (Penyelenggaraan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Capaian Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah Daerah: a. Penyelenggaraan Birokrasi	100% (Baik)	Baik	10	6	10	26	
			b. Persentase Capaian Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Daerah	91% (Baik)	Baik					
	S.2 Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyelenggaraan Birokrasi	-	Baik	10	5	7	22	

	S.3 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,98	Baik		10	4	8	22	
					Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Baik					
S.4 Terimplementasikannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP	93,7 (Sangat Baik)	Sangat Baik	10	7	4	21		
				83,67 (A)	A						
S.5 Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	-	-	Baik	10	5	8	23		
S.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	-	-	Baik	10	8	9	27		Prioritas 3
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	10	4	7	21		

	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	-	Baik	10	9	9	9	28	Prioritas 2
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Waspada	TerJAGA	10	4	4	4	18	
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	48,88 (Kurang)	Sangat Baik	10	6	5	21		
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	-	Sangat Baik	10	4	4	18		
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	93,28 (Sangat Memuaskan)	Sangat Memuaskan	10	5	5	20		
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	-	Baik	10	10	10	30		Prioritas 1
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan & aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	59,7 (Cukup)	Baik	10	7	7	24		
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	WTP	WTP	10	5	5	20		

			Capaian Akuntabilitas Keuangan: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	91%	Baik					
SS.2 Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional	S.1 Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	300,5 (Baik)	Sangat Baik	10	6	5	21	
	S.2 Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Indeks Sistem Merit	300,5 (Baik)	Sangat Baik	10	6	6	22	
	S.3 Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-	-	-	-	-	0	0	0	
	S.4 Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-	-	-	-	-	0	0	0	
	S.5 Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-	-	-	-	-	0	0	0	

S.6 Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Sistem Merit	300,5 (Baik)	Sangat Baik	10	5	6	21	
S.7 Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	62,8% (Cukup Sehat)	A (Sehat)	10	6	6	22	
		Nilai <i>Employer Branding</i> ASN	-	Baik					
		Indeks Pelayanan Publik	4,55 (Pelayanan Prima)	Pelayanan Prima	10	4	6	20	
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	90,75 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi)	Zona Hijau Kualitas Tertinggi					
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,24 (Baik)	Baik					

3.3. Perencanaan Reformasi Birokrasi Tematik

3.3.1. Kondisi Umum dan Pemilihan Tema RB Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik yang dipilih dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas tema dengan kondisi sebagai berikut.

a. Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan telah lama diadopsi sebagai isu lintas sektor, sehingga dalam penanggannya perlu koordinasi lintas sektor. Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia selaku ketua TNP2K, sedangkan pelaksanaan di daerah dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Secara lebih teknis, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah/ Unit Kerja sekaligus, dengan melihat pada aspek-aspek kemiskinan yang berbeda sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Strategi yang dilaksanakan di awal dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (Penangkis) Kota Yogyakarta, termasuk Tim Penangkis Kemantren, dan Tim Penangkis Kelurahan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Selain itu strategi yang perlu dilakukan adalah pengelolaan data yang terpadu dan akurat, sehingga data tersebut dapat dengan tepat mengintervensi warga masyarakat yang kurang mampu. Sinergi dalam program Gandeng Gendong dari 5 sektor - yaitu: Pemerintah Kota Yogyakarta (koordinasi lintas Perangkat Daerah), Korporasi, Komunitas, Kampung, dan Kampus/Universitas - merupakan upaya dalam menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan ekonomi dan UMKM.

Posisi relatif kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 adalah 6,62%. Angka tersebut berada di bawah angka rerata Provinsi DIY di angka 12,8%. Secara umum, *trend* dan pola kemiskinan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan. Namun di tahun 2020 dan 2021, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan pola kenaikan dikarenakan pandemi Covid-19. Namun di tahun 2022 posisi angka kemiskinan kembali mengalami penurunan.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi di dalam Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mendongkrak pembangunan ekonomi dari suatu daerah. Di Pemerintah Kota Yogyakarta, langkah strategis untuk peningkatan investasi dibagi menjadi dua langkah, yaitu: perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal; dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Langkah strategis tersebut dilaksanakan dan dimonitoring dan dievaluasi oleh DPMPTSP sebagai *leading sector* peningkatan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Langkah strategis perencanaan termasuk di dalamnya adalah pembuatan Perda dan Perwal yang berfokus pada pengaturan penumbuhan iklim investasi di Kota Yogyakarta. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha ini perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

Secara data, persentase realisasi investasi pada tahun 2018-2019 sudah mencapai lebih dari 100%, dengan realisasi di tahun 2018 sebesar 103,51%, dan realisasi di tahun 2019 sebesar 105,58%. Namun di tahun 2020-2021 capaian realisasi investasi mengalami penurunan dengan capaian kurang dari 100% dikarenakan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha.

c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

RB Tematik dalam hal digitalisasi administrasi pemerintahan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemanfaatan sistem elektronik untuk mempercepat penanganan stunting. Selama ini data stunting di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta masih dilakukan secara manual dilakukan oleh kader di Puskesmas. Data menunjukkan prevalensi penurunan stunting di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi di tiga tahun terakhir ini. Di tahun 2022 prevalensi stunting menurut SSGI adalah 13,7%, dengan target di tahun 2023-2026 adalah 12%. Hal ini mengacu pada target prevalensi stunting tingkat nasional sebesar 14% di tahun 2024.

Selama ini data prevalensi stunting didapatkan dari pengisian mandiri dari kader-kader Puskesmas di Kota Yogyakarta melalui aplikasi e-PPGBM (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat) yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Namun ada kelemahan pada aplikasi tersebut, diantaranya adalah input mandiri berdasarkan penimbangan bayi yang dilakukan tiap bulan, belum bisa diperbandingkan antar-daerah, dan pengukuran dapat berbeda-beda karena alat yang digunakan juga bisa berbeda-beda. Dengan adanya beberapa kelemahan-kelemahan dari aplikasi tersebut, maka diperlukannya pembuatan aplikasi yang dapat terintegrasi di JSS dengan data tersaji sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

RB untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisien, serta memprioritaskan penggunaan PDN untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya dengan mendominasi E-Katalog pengadaan barang/jasa dengan PDN berdasar pada INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Realisasi penggunaan produk dalam negeri di Pemerintah Kota Yogyakarta, masih tercatat 25% di tahun 2022. Hal ini merupakan bukti Masih minimnya Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan produk dalam negeri untuk kebutuhan internal dan eksternal/ masih banyak yang memanfaatkan produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Target di tahun 2023 adalah 40% realisasi penggunaan produk dalam Negeri, dan menjadi 70% di akhir tahun Road Map tahun 2026.

e. Pengendalian Inflasi

Inflasi terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan dan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat di suatu wilayah. Kenaikan atau penurunan inflasi disebut dengan laju inflasi. Menurut data statistik BPS, laju inflasi di Kota Yogyakarta dari kurun waktu 2016-2019 adalah fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan 16,96% per tahun. Data dari BPS, mulai tahun 2020 terdapat perbedaan perhitungan inflasi di Kota Yogyakarta dengan pengelompokan pengeluaran menjadi 11 kelompok pengeluaran. Nilai inflasi Kota Yogyakarta di tahun 2020 lebih rendah dari tingkat Nasional, yaitu 1,40% dengan inflasi Nasional 1,68%. Sedangkan di tahun 2021 inflasi Kota Yogyakarta mengalami kenaikan menjadi 2,29%, sehingga lebih tinggi dari inflasi Nasional yaitu 1,87%. Di tahun 2022, tingkat inflasi Kota Yogyakarta meningkat menjadi 6,49%. Tingkat inflasi ini meningkat dari tahun-tahun lalu. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal ataupun eksternal, sehingga perlu adanya pengendalian.

3.3.2. Perbaikan Target RB Tematik

Tabel 3.3.2. Perbaikan Target RB Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator & Target (Lama)					Perbaikan Indikator & Target (Baru)					Koordinator		
		Indikator	Target				Indikator	Ease line 2022	Target					
			2022	2023	2024	2025			2026	2023	2024		2025	2026
Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,62	6,61	6,64	6,21	6,01	Angka Kemiskinan	6,62%	6,61% - 6,61%	6,07% - 6,60%	6,01% - 6,59%	Buppela	
									Angka Kemiskinan Ekstrem	0,67%				
Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi	Realisasi Nilai Investasi	308.015.205.801 Rupiah	319.866.195.786 Rupiah	332.380.884.182 Rupiah	345.277.262.488 Rupiah	358.674.020.272 Rupiah	Realisasi Nilai Investasi	308.015.205.801 Rupiah	6,61% - 7,37%	6,13% - 6,61%	6,07% - 6,60%	358.674.020.272 - 733.200.000.000 Rupiah	DPMPTSP
									Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93,97	94	95	96	97
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Terbentuknya sistem database stunting		90%	100%	100%	100%	Prevalensi Stunting	12%	12%	12%	12%		Dinkes
									Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	25%	40% realisasi PDN	50% realisasi PDN	60% realisasi PDN	70% realisasi PDN
Peningkatan Pengawasan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya pengawasan produk dalam negeri	Inflasi Kota Yogyakarta	6,49	3,0%a1	3,0%a1	2,5%a1	2,5%a1	Inflasi Kota Yogyakarta	6,49	3,0%a1	3,0%a1	2,5%a1	2,5%a1	Bagian PK

Dalam hal terdapat perubahan target dalam dokumen perencanaan, maka mengacu pada dokumen perencanaan yang terbaru.

3.3.3. Penetapan Prioritas Tema RB Tematik

Penetapan tema harus didasarkan dengan mempertimbangkan 5 (lima) faktor sebagai berikut:

a. Faktor Kesesuaian dengan Prioritas Daerah

Faktor kesesuaian diartikan sebagai upaya daerah untuk menemukan kesesuaian tema yang dipilih berdasar kondisi prioritas dan data eksisting yang dimiliki daerah. Artinya suatu tema menjadi masalah khusus dan memperoleh perhatian sehingga dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Daerah).

b. Faktor Keparahan Masalah

Urgensi penyelesaian masalah yang menjadi tupoksi daerah menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan tema RB Tematik. Artinya bahwa tema yang dipilih dianggap telah mencapai tahap yang krisis dan tidak dapat diabaikan.

c. Faktor Dampak terhadap Ekonomi/Kesejahteraan Masyarakat

Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama penentu pemilihan tema RB Tematik. Hal ini dikarenakan, apabila tema tersebut tidak dipilih maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak negatif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, begitu pula sebaliknya.

d. Faktor Potensi

Faktor lain yang juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan tema adalah adanya potensi yang dimiliki daerah. Artinya bahwa tema yang dipilih didasarkan pada aset kekayaan yang dimiliki daerah atau instansi yang dijadikan sebagai sarana pembangunan.

e. Faktor Percepatan Kinerja

Percepatan kinerja daerah dalam pelaksanaan pembangunan RB menjadi faktor utama lainnya dalam penentuan tema RB Tematik. Artinya, ketika ditemukan kondisi yang tidak signifikan negatif pada data yang ada, maka instansi dapat memilih tema yang masih memerlukan percepatan intervensi agar memperoleh hasil kinerja yang lebih optimal.

Tabel 3.3.3. Form Penetapan Prioritas Tema RB Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base line 2022	Target 2026	Kesesuaian Prioritas RPD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang Dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total	Ket.
Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,62	6,01% - 6,59%	10	9	10	8	7	44	Prioritas 1
		Angka Kemiskinan Ekstrem	0,67%								
Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi	Realisasi Nilai Investasi	308.015.205.801 Rupiah	358.674.020.272 - 733.200.000.000 Rupiah	10	6	7	4	8	35	
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93,97	97	10	6	7	8	8	39	Prioritas 2
		Menurunnya angka stunting	-	12%							
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	25%	70% realisasi PDN	10	5	8	8	6	37	Prioritas 3
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya inflasi	Inflasi Kota Yogyakarta	6,49	2,5%±1	10	6	8	4	6	34	

Berdasarkan tabel 3.3.3. Form Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik tersebut di atas, prioritas pertama dari RB Tematik adalah masalah kemiskinan, prioritas kedua adalah digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas ketiga adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Namun dengan adanya ketiga prioritas tersebut tidak berarti tema tematik lainnya tidak dikerjakan. Tema tematik lain tetap akan berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Prinsip Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penetapan strategi pada Road Map RB Pemerintah Kota Yogyakarta Periode 2023–2026 dilakukan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja leading sektor pengampu kebijakan dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif.

- a. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat.
- b. Prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan.
- c. Kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu.
- d. Antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan megatrend ke depan.

4.2. Pembentukan Tim Pengelola RB

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan RB perlu dibentuk Tim Pengelola RB yang berperan sebagai *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk melakukan pengelolaan RB dan memastikan bahwa seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan target dan tatakala yang telah ditentukan. Tim Pengelola RB Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB. Tugas dari Tim Pengelola RB ini adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Pusat;
- b. melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik.
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB.
- e. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Pembentukan Tim Pengelola RB sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4.3. Tahapan Pelaksanaan RB

Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi 5 (lima) tahapan sebagai berikut.

4.3.1. Menetapkan *Road Map* RB

Penetapan *Road Map* RB adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* RB antara lain:

- 1) isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- 2) capaian RB Instansional;
- 3) tujuan dan sasaran strategis RB Instansional;
- 4) strategi dan program RB Instansional baik general maupun tematik;
- 5) manajemen/pengelolaan RB Instansional.

4.3.2. Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan RB

Penyusunan Rencana Aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB Pemerintah Kota Yogyakarta baik RB General maupun RB Tematik. Rencana aksi minimal berisi:

- 1) rincian kegiatan;
- 2) indikator output dari rincian kegiatan;
- 3) target;
- 4) waktu pelaksanaan; serta
- 5) penanggung jawab.

Rencana Aksi RB sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4.3.3. Mengelola Pelaksanaan Rencana Aksi

Pengelolaan Rencana Aksi yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim Pengelola RB perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah/ Unit Kerja selaku koordinator/ *leading sector* di masing-masing kegiatan rencana aksi.

4.3.4. Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi RB di Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu pada *Road Map* RB sebagai pedoman. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergitas, integrasi dan penyederhanaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Melalui monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini diharapkan terjadi keselarasan antara pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi RB untuk:

- a. memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
- b. menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan

- c. menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pada tahap ini Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

4.3.5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan Menjadi Masukkan Penyusunan Rencana Aksi Tahun Berikutnya.

Penyusunan RATL dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang mampu ketugasan keorganisasian. Selanjutnya RATL dituangkan dalam Rencana Aksi RB General dan RB Tematik tahun berikutnya. Rencana Aksi Tindak Lanjut didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB baik RB General maupun RB Tematik dalam rangka memperbaiki catatan dan melaksanakan rekomendasi yang tertuang dalam LHE RB.

4.4. Mekanisme Monitoring Evaluasi RB

4.4.1. Mekanisme Monitoring

Mekanisme monitoring pelaksanaan RB dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Inspektorat selaku APIP Pemerintah Kota Yogyakarta mengoordinasikan monitoring pelaksanaan RB Tingkat Perangkat Daerah/ Unit Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
- b. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja selaku koordinator / *leading sector* melaksanakan monitoring atas rencana aksi yang telah ditetapkan.
- c. Inspektorat selaku APIP Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan monitoring pelaksanaan RB. Dalam melaksanakan monitoring tersebut Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Tim Pengelola RB.

4.4.2. Mekanisme Evaluasi

4.4.2.1. Evaluasi RB Level Pemerintah Daerah

a. Evaluasi Internal

Evaluasi internal dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertindak sebagai evaluator internal. Evaluasi Internal dilakukan pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan sebagai berikut.

- 1) Evaluasi pada tahapan perencanaan (evaluasi *Ex-Ante*) dilakukan untuk memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi berisi upaya *reform* yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan.
- 2) Evaluasi pada tahapan pelaksanaan (evaluasi *On-Going*) dilakukan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan upaya *reform* dibandingkan dengan rencana yang telah

dirumuskan dalam road map dan rencana aksi RB. Evaluasi ini dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Evaluasi pelaksanaan RB setidaknya mencakup hal - hal berikut ini:

- a) pengukuran ketercapaian rencana aksi RB;
- b) rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan RB; dan
- c) ringkasan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Eksternal (Nasional) paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional atau menyesuaikan kebijakan terkait mekanisme dan tata kala dari Pemerintah Pusat.


b. Evaluasi Eksternal (*Ex-Post*)

Evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pasca tahap pelaksanaan. Evaluasi eksternal bertujuan melihat hasil/ dampak pelaksanaan *reform* baik bagi internal organisasi maupun bagi masyarakat dan *stakeholder*.

4.4.2.2. Evaluasi RB Level Perangkat Daerah

Evaluasi RB Level Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan upaya *reform* terhadap tata kelola internal Perangkat Daerah. Sehingga seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja selain melaksanakan upaya - upaya Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah berdasar *Road Map* dan Rencana Aksi RB, juga harus berupaya melaksanakan *reform* tata kelola internalnya.

Evaluasi RB Level Perangkat Daerah dilaksanakan melalui penilaian terhadap beberapa parameter oleh Perangkat Daerah/ Unit Kerja *leading sector* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa parameter yang menjadi komponen evaluasi RB Level Perangkat Daerah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap nilai masing - masing parameter. Evaluasi tersebut dikoordinasikan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertindak sebagai evaluator internal. Komponen penilaian, pembobotan, kriteria dan mekanisme evaluasi RB Level Perangkat Daerah ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Kota.

PJ. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO